



## **FAQ Layanan Informasi Perkara dan Prosedur di Pengadilan Agama Yogyakarta**

### **FAQ LAYANAN PENGADILAN AGAMA DI BIDANG EKONOMI SYARIAH**

#### **VII. Istilah Umum dan Prosedur Tambahan dalam Ekonomi Syariah**

##### **1. Apa itu Otoritas Jasa Keuangan (OJK)?**

OJK adalah lembaga yang mengawasi seluruh kegiatan di sektor jasa keuangan, termasuk lembaga keuangan syariah.

##### **2. Apa peran OJK dalam sengketa ekonomi syariah?**

OJK dapat memberikan edukasi dan mediasi awal, serta mengeluarkan peraturan terkait jasa keuangan syariah. Namun, penyelesaian sengketa hukum tetap di Pengadilan Agama atau arbitrase syariah.

##### **3. Apa itu Bank Indonesia (BI)?**

BI adalah bank sentral Republik Indonesia yang mengatur dan mengawasi sistem pembayaran.

##### **4. Apa peran BI dalam ekonomi syariah?**

BI mengatur sistem pembayaran syariah dan mengeluarkan kebijakan moneter yang selaras dengan prinsip syariah.

##### **5. Apa itu Lembaga Keuangan Syariah (LKS)?**

LKS adalah lembaga yang menawarkan produk dan layanan keuangan berdasarkan prinsip syariah, seperti bank syariah, asuransi syariah, dan multifinance syariah.

## **6. Apa itu Prinsip Kepatuhan Syariah?**

Prinsip di mana seluruh kegiatan LKS harus sesuai dengan ajaran dan hukum Islam.

## **7. Apa itu Pembiayaan Syariah?**

Penyediaan dana atau tagihan yang setara dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank syariah dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan dana atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.

## **8. Apa itu Risiko Usaha dalam Syariah?**

Risiko yang melekat pada investasi atau pembiayaan yang berbasis bagi hasil, di mana keuntungan dan kerugian ditanggung bersama.

## **9. Apakah ada konsep bunga dalam ekonomi syariah?**

Tidak, dalam ekonomi syariah tidak dikenal konsep bunga (riba). Sebagai gantinya, digunakan sistem bagi hasil, margin keuntungan, atau biaya sewa.

## **10. Apa itu Sektor Riil dalam Ekonomi Syariah?**

Kegiatan ekonomi yang berbasis pada sektor produksi barang dan jasa yang nyata, bukan spekulasi keuangan.

## **11. Bagaimana Pengadilan Agama menentukan ganti rugi dalam PMH dan Wanprestasi?**

Ganti rugi dihitung berdasarkan kerugian yang nyata diderita (kerugian materiil) dan potensi keuntungan yang hilang. Kadang juga mempertimbangkan kerugian immateriil.

## **12. Apa itu Eksepsi?**

Keberatan yang diajukan oleh tergugat terhadap gugatan penggugat yang tidak menyentuh pokok perkara, misalnya gugatan tidak jelas atau bukan kewenangan pengadilan.

## **13. Apa itu Intervensi?**

Campur tangan pihak ketiga dalam suatu perkara yang sedang berjalan di Pengadilan.

## **14. Apa itu Putusan Sela?**

Putusan yang dijatuhkan di tengah proses persidangan, sebelum putusan akhir.

## **15. Apa itu Putusan Akhir?**

Putusan yang mengakhiri seluruh pemeriksaan pokok perkara.

## **16. Apakah ada jangka waktu tertentu untuk melunasi utang setelah putusan inkraacht?**

Biasanya ada jangka waktu sukarela yang diberikan. Jika tidak dipenuhi, dapat diajukan permohonan eksekusi.

## **17. Apa itu Perjanjian Pra-Nikah Syariah?**

Perjanjian yang dibuat sebelum perkawinan yang mengatur tentang harta atau hal lain sesuai prinsip syariah.

## **18. Apakah Perjanjian Pra-Nikah Syariah dapat diajukan sengketa di Pengadilan Agama?**

Ya, jika ada sengketa mengenai pelaksanaan perjanjian tersebut.

**19. Apa itu Konversi Bank Konvensional ke Bank Syariah?**

Proses perubahan operasional bank dari sistem konvensional menjadi syariah.

**20. Apakah Pengadilan Agama berwenang atas sengketa yang timbul dari konversi tersebut?**

Jika sengketa terkait dengan akad syariah yang timbul setelah konversi, maka ya.

**21. Apa itu Pihak Ketiga dalam Sengketa?**

Pihak yang tidak terlibat langsung dalam perjanjian, namun memiliki kepentingan hukum dalam sengketa.

**22. Bagaimana cara menghadirkan ahli dalam persidangan?**

Para pihak dapat mengajukan permohonan kepada majelis hakim untuk menghadirkan ahli yang memiliki keahlian di bidang tertentu.

**23. Apa itu Jaminan Fidusia dalam Syariah?**

Jaminan atas benda bergerak (misalnya kendaraan) yang hak kepemilikannya tetap pada pemberi jaminan, namun kepemilikan yuridisnya beralih kepada penerima jaminan.

**24. Apakah Pengadilan Agama berwenang atas sengketa Jaminan Fidusia Syariah?**

Ya, jika sengketa timbul dari akad syariah.

**25. Apa itu Sertifikat Fidusia?**

Bukti pendaftaran Jaminan Fidusia di Kantor Pendaftaran Fidusia.

## **26. Bagaimana eksekusi Jaminan Fidusia Syariah?**

Mirip dengan Hak Tanggungan, dapat dilakukan melalui lelang atau penjualan di bawah tangan jika ada kesepakatan. Jika ada sengketa, Pengadilan Agama menjadi berwenang.

## **27. Apa itu Gugatan Intervensi?**

Gugatan yang diajukan oleh pihak ketiga yang merasa kepentingannya terganggu oleh sengketa yang sedang berjalan.

## **28. Apakah ada program bantuan hukum khusus untuk sengketa ekonomi syariah?**

Anda dapat mencari informasi di Pos Bantuan Hukum (Posbakum) Pengadilan Agama atau lembaga bantuan hukum yang fokus pada ekonomi syariah.

## **29. Apa itu Kompensasi dalam Sengketa?**

Pembayaran ganti rugi atas kerugian yang diderita oleh salah satu pihak.

## **30. Apa itu Novasi dalam Akad Syariah?**

Pembaharuan perjanjian, di mana perjanjian lama diganti dengan perjanjian baru.

## **31. Apa itu Subrogasi dalam Akad Syariah?**

Penggantian kedudukan kreditur oleh pihak ketiga yang membayar utang debitur.

### **32. Apakah Pengadilan Agama dapat memerintahkan audit syariah?**

Dalam kasus tertentu, Pengadilan Agama dapat memerintahkan audit syariah untuk membuktikan kesesuaian transaksi dengan prinsip syariah.

### **33. Apa itu Prinsip Bagi Hasil dalam Ekonomi Syariah?**

Prinsip di mana keuntungan dan kerugian dibagi berdasarkan proporsi yang disepakati, bukan berdasarkan bunga.

### **34. Apa itu Jual Beli Murabahah?**

Salah satu bentuk pembiayaan syariah, di mana bank membeli barang yang dibutuhkan nasabah, kemudian menjualnya kembali kepada nasabah dengan tambahan keuntungan yang disepakati.

### **35. Apa itu Sewa Ijarah Muntahiyah Bittamlik (IMBT)?**

Akad sewa yang diakhiri dengan pengalihan kepemilikan aset kepada penyewa.

### **36. Apa itu Wakaf Uang Produktif?**

Wakaf dalam bentuk uang yang dikelola untuk menghasilkan keuntungan yang kemudian disalurkan untuk tujuan kebajikan.

### **37. Bagaimana jika sengketa terjadi antara nasabah dan LKS yang memiliki Dewan Pengawas Syariah?**

Pendapat dari DPS LKS dapat menjadi salah satu alat bukti yang diajukan dalam persidangan.

### **38. Apa itu Prinsip Risiko Bersama dalam Syariah?**

Prinsip di mana risiko dalam transaksi investasi atau pembiayaan ditanggung bersama antara para pihak.

### **39. Apakah ada ketentuan mengenai denda keterlambatan dalam syariah?**

Dalam syariah, denda keterlambatan (ta'widh) tidak boleh dihitung secara bunga, tetapi dapat berupa sanksi yang disepakati untuk tujuan sosial dan tidak untuk keuntungan kreditur.

### **40. Apa itu Arbitrase Ad Hoc?**

Arbitrase yang dibentuk khusus untuk menyelesaikan satu sengketa tertentu.

### **41. Apakah Pengadilan Agama mengesahkan putusan arbitrase?**

Ya, putusan arbitrase (termasuk Basyarnas) harus diajukan permohonan pendaftaran dan eksekusi ke Pengadilan Agama.

### **42. Apa itu Putusan Perdamaian (Dading)?**

Putusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan berdasarkan kesepakatan damai para pihak dalam mediasi.

### **43. Apakah Putusan Perdamaian dapat dieksekusi?**

Ya, putusan perdamaian memiliki kekuatan hukum yang sama dengan putusan biasa dan dapat dieksekusi.

### **44. Apa itu Eksepsi Kompetensi Absolut?**

Keberatan yang menyatakan bahwa Pengadilan Agama tidak berwenang mengadili jenis perkara tersebut.

#### **45. Apa itu Eksepsi Kompetensi Relatif?**

Keberatan yang menyatakan bahwa Pengadilan Agama yang dituju tidak berwenang secara wilayah.

#### **46. Bagaimana jika gugatan diajukan ke Pengadilan yang salah?**

Pengadilan akan menyatakan tidak berwenang dan mengembalikan gugatan kepada penggugat.

#### **47. Apa itu Pembuktian Terbalik dalam Sengketa Ekonomi Syariah?**

Dalam beberapa kasus tertentu, beban pembuktian dapat dibebankan kepada pihak tergugat, terutama dalam kasus yang melibatkan informasi yang hanya diketahui oleh tergugat.

#### **48. Apa itu Klaim Kerugian Immaterial?**

Tuntutan ganti rugi atas kerugian non-materiil, seperti kerugian nama baik atau trauma psikologis.

#### **49. Apakah Pengadilan Agama dapat memerintahkan sita terhadap aset di luar wilayah hukumnya?**

Ya, dengan mekanisme delegasi kepada Pengadilan Agama yang berwenang di wilayah aset tersebut.

#### **50. Apa itu Pelaksana Lelang?**

Pihak yang ditunjuk oleh KPKNL untuk melaksanakan proses penjualan aset melalui lelang.

#### **51. Apa itu Risalah Lelang?**

Berita acara resmi yang dibuat oleh Pelaksana Lelang setelah lelang selesai, yang berisi hasil lelang.

**52. Apakah Risalah Lelang memiliki kekuatan hukum?**

Ya, Risalah Lelang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat.

**53. Apa itu Hak Guna Bangunan (HGB) dan Hak Milik (HM) dalam jaminan syariah?**

Hak Guna Bangunan dan Hak Milik adalah jenis hak atas tanah yang dapat dijadikan objek Hak Tanggungan syariah.

**54. Bagaimana jika objek jaminan adalah aset bergerak?**

Dapat menggunakan Jaminan Fidusia atau perjanjian gadai.

**55. Apa itu Eksekusi Jaminan Langsung (Parate Executie)?**

Eksekusi yang dilakukan oleh kreditur tanpa melalui Pengadilan, jika diatur dalam perjanjian dan jaminan telah didaftarkan. Namun, seringkali memerlukan penetapan Pengadilan jika ada sengketa.

**56. Apakah Pengadilan Agama dapat memutus sengketa pembiayaan mikro syariah?**

Ya, sengketa yang timbul dari pembiayaan mikro syariah juga menjadi kewenangan Pengadilan Agama.

**57. Apa itu Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP)?**

Sistem yang digunakan oleh Pengadilan untuk mengelola dan menyediakan informasi status perkara secara online.

**58. Apakah saya bisa mengajukan permohonan pembatalan putusan arbitrase di Pengadilan Agama?**

Ya, putusan arbitrase dapat diajukan pembatalan ke Pengadilan Agama jika ada alasan-alasan yang sah menurut undang-undang arbitrase.

**59. Apa itu Kontrak Investasi Kolektif (KIK) Syariah?**

Perjanjian antara manajer investasi dan bank kustodian yang mengikat pemegang unit penyertaan reksa dana syariah.

**60. Apakah Pengadilan Agama berwenang atas sengketa KIK Syariah?**

Ya, jika sengketa terkait dengan prinsip syariah dalam KIK.

**61. Apa itu Akad Tabungan Syariah?**

Akad yang digunakan dalam produk tabungan di bank syariah, umumnya berupa wadiah atau mudharabah.

**62. Apa itu Prinsip Keadilan Distributif?**

Prinsip dalam ekonomi syariah yang menekankan pemerataan kesejahteraan dan distribusi kekayaan yang adil.

**63. Apa itu Transaksi Derivatif Syariah?**

Transaksi derivatif yang telah disesuaikan dengan prinsip syariah, seperti forward, option, atau swap syariah.

**64. Apakah Pengadilan Agama berwenang atas sengketa Transaksi Derivatif Syariah?**

Ya, jika sengketa timbul dari akad syariah.

**65. Apa itu Ganti Rugi Berdasarkan Keuntungan yang Diharapkan (Loss of Profit)?**

Jenis ganti rugi yang menuntut pembayaran atas keuntungan yang seharusnya didapat jika tidak terjadi wanprestasi atau PMH.

**66. Apa itu Ganti Rugi Kerugian Materiil Langsung?**

Ganti rugi atas kerugian nyata yang diderita akibat wanprestasi atau PMH.

**67. Apakah Pengadilan Agama dapat memerintahkan mediasi di luar pengadilan?**

Pengadilan Agama mewajibkan mediasi di Pengadilan. Namun, para pihak bebas untuk mencoba mediasi di luar pengadilan secara sukarela.

**68. Apa itu Hukum Acara Perdata?**

Aturan-aturan yang mengatur tata cara penyelesaian perkara perdata di Pengadilan.

**69. Apakah Hukum Acara Perdata umum berlaku juga di Pengadilan Agama?**

Ya, sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan hukum acara khusus di Pengadilan Agama.

**70. Apa itu Prinsip Itikad Baik dalam Perjanjian Syariah?**

Prinsip bahwa para pihak dalam perjanjian syariah harus bertindak jujur dan tulus dalam melaksanakan kewajibannya.

**71. Apa itu Pengelolaan Risiko dalam Ekonomi Syariah?**

Proses identifikasi, penilaian, dan pengendalian risiko dalam transaksi keuangan syariah.

**72. Apa itu Akad Syariah yang Dianggap Batal?**

Akad yang tidak memenuhi syarat sahnya perjanjian menurut syariat atau undang-undang, sehingga dianggap tidak pernah ada.

**73. Apa akibat hukum dari akad yang batal?**

Para pihak harus mengembalikan keadaan seperti semula seolah-olah tidak ada akad.

**74. Apakah ada sengketa terkait investasi syariah yang ditangani Pengadilan Agama?**

Ya, semua sengketa investasi yang menggunakan akad syariah adalah kewenangan Pengadilan Agama.

**75. Apa itu Pasar Modal Syariah?**

Pasar modal yang kegiatan dan produknya sesuai dengan prinsip syariah.

**76. Apakah Pengadilan Agama berwenang atas sengketa Pasar Modal Syariah?**

Ya, jika sengketa timbul dari transaksi atau produk syariah di pasar modal.

**77. Apa itu Obligasi Syariah Negara (Sukuk Negara)?**

Surat berharga negara yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah.

**78. Apakah Pengadilan Agama mengurus sengketa Sukuk Negara?**

Jika ada sengketa perdata terkait Sukuk Negara yang menggunakan prinsip syariah, Pengadilan Agama berwenang.

**79. Apa itu Zakat Perusahaan Syariah?**

Zakat yang dikeluarkan oleh badan usaha atau perusahaan yang beroperasi sesuai prinsip syariah.

**80. Apakah Pengadilan Agama mengurus sengketa Zakat Perusahaan Syariah?**

Ya, jika ada sengketa antara perusahaan dan amil zakat atau mustahik terkait zakat tersebut.

**81. Apa itu Rekening Dana Nasabah (RDN) Syariah?**

Rekening khusus nasabah di pasar modal syariah.

**82. Apakah Pengadilan Agama berwenang atas sengketa RDN Syariah?**

Jika sengketa terkait dengan pengelolaan dana syariah dalam RDN.

**83. Apa itu Fatwa DSN-MUI tentang Fintech Syariah?**

Fatwa yang mengatur mengenai praktik keuangan berbasis teknologi yang sesuai dengan prinsip syariah.

**84. Apakah Pengadilan Agama berwenang atas sengketa Fintech Syariah?**

Ya, jika sengketa tersebut melibatkan transaksi atau akad syariah dalam Fintech.

**85. Apa itu Ujroh?**

Ujroh adalah upah atau imbalan atas jasa yang diberikan dalam akad Ijarah atau Wakalah.

**86. Apa itu Pembiayaan Multiguna Syariah?**

Pembiayaan untuk berbagai keperluan konsumtif yang menggunakan akad syariah (misalnya Murabahah atau Ijarah).

**87. Apakah Pengadilan Agama berwenang atas sengketa Pembiayaan Multiguna Syariah?**

Ya, jika sengketa timbul dari akad syariah.

**88. Apa itu Dana Kebajikan dalam Lembaga Keuangan Syariah?**

Dana yang dihimpun dari denda, sanksi, atau sumber non-halal lainnya yang digunakan untuk tujuan sosial dan kebajikan.

**89. Apakah Pengadilan Agama dapat memutus sengketa terkait Dana Kebajikan?**

Ya, jika ada sengketa mengenai pengelolaan atau penyaluran Dana Kebajikan.

**90. Apa itu Transaksi Muamalah?**

Segala bentuk hubungan antarmanusia dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam kegiatan ekonomi.

**91. Apa itu Wakaf Uang?**

Wakaf dalam bentuk uang yang disalurkan melalui lembaga keuangan syariah.

**92. Apakah Pengadilan Agama berwenang atas sengketa Wakaf Uang?**

Ya, jika ada sengketa terkait pengelolaan atau peruntukan Wakaf Uang.

**93. Apa itu Akad Rahn Tasjily?**

Akad gadai yang di mana barang jaminan tidak disimpan oleh penerima gadai, tetapi hanya dicatat kepemilikannya.

**94. Apakah Pengadilan Agama berwenang atas sengketa Rahn Tasjily?**

Ya, jika sengketa timbul dari akad Rahn Tasjily.

**95. Apa itu Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Syariah?**

Proses hukum di mana debitur yang tidak dapat membayar utangnya dapat mengajukan permohonan penundaan pembayaran untuk menyusun rencana perdamaian dengan kreditur, sesuai prinsip syariah.

**96. Apakah Pengadilan Agama berwenang atas PKPU Syariah?**

Ya, permohonan PKPU Syariah diajukan ke Pengadilan Agama.

**97. Apa itu Kepailitan Syariah?**

Proses hukum di mana debitur yang tidak dapat membayar utangnya dinyatakan pailit oleh Pengadilan, sesuai prinsip syariah.

**98. Apakah Pengadilan Agama berwenang atas Kepailitan Syariah?**

Ya, permohonan Kepailitan Syariah diajukan ke Pengadilan Agama.

**99. Apa itu Kurator dalam Kepailitan Syariah?**

Pihak yang ditunjuk oleh Pengadilan untuk mengurus dan membereskan harta pailit.

**100. Apa itu Hakim Pengawas dalam Kepailitan Syariah?**

Hakim yang ditunjuk oleh Pengadilan untuk mengawasi kinerja kurator.

**101. Apakah ada biaya untuk permohonan PKPU atau Kepailitan Syariah?**

Ya, ada biaya administrasi dan biaya pengurusan yang cukup besar.

**102. Apa itu Restrukturisasi Pembiayaan Syariah?**

Perubahan persyaratan pembiayaan syariah untuk membantu nasabah yang kesulitan membayar.

**103. Apakah Pengadilan Agama berwenang atas sengketa Restrukturisasi Pembiayaan Syariah?**

Ya, jika sengketa timbul dari proses restrukturisasi yang menggunakan akad syariah.

**104. Apa itu Penipuan dalam Ekonomi Syariah?**

Tindakan curang yang dilakukan untuk mendapatkan keuntungan dengan merugikan orang lain dalam transaksi syariah.

**105. Bagaimana Pengadilan Agama menangani penipuan dalam ekonomi syariah?**

Proses hukum di mana debitur yang tidak dapat membayar utangnya dapat mengajukan permohonan penundaan pembayaran untuk menyusun rencana perdamaian dengan kreditur, sesuai prinsip syariah.

**106. Apa itu Sertifikasi Halal?**

Proses untuk menyatakan bahwa suatu produk atau jasa memenuhi standar kehalalan menurut syariat Islam.

**107. Apakah Pengadilan Agama berwenang atas sengketa Sertifikasi Halal?**

Tidak, sengketa terkait proses sertifikasi halal umumnya ditangani oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) atau lembaga terkait lainnya. Namun, jika timbul kerugian perdata dari sengketa tersebut, dapat diajukan gugatan PMH.

**108. Apa itu Transaksi Derivatif Konvensional?**

Transaksi derivatif yang tidak memenuhi prinsip syariah dan dilarang dalam ekonomi syariah.

**109. Apakah Pengadilan Agama berwenang atas sengketa Transaksi Derivatif Konvensional?**

Tidak, Pengadilan Agama hanya berwenang atas transaksi yang berlandaskan prinsip syariah.

**110. Bagaimana cara mendapatkan informasi terkini tentang Fatwa DSN-MUI?**

Melalui situs web Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) atau Otoritas Jasa Keuangan (OJK).